

INGGRIS DALAM UNI EUROPA: KEANGGOTAAN SETENGAH HATI?

Oleh: Kurniawati

Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak:

Inggris adalah salah satu anggota Uni Eropa yang memiliki karakteristik yang unik dari negara-negara anggota lainnya. Tulisan ini akan mendiskusikan alasan-alasan yang mendorong Inggris melamar keanggotaan Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eropa), juga alasan yang membuat Presiden Perancis de Gaulle amat menentang keanggotaan Inggris dalam MEE. Sejak resmi bergabung dengan Uni Eropa tahun 1973 (dahulu masih European Community) Inggris selalu menunjukkan sikap berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Sikap berbeda tersebut konsisten ditunjukkan oleh perdana menteri-perdana menteri yang memerintah Inggris baik dari Partai Konservatif maupun Partai Buruh. Margareth Thatcher (1979-1990) dapat dikatakan sebagai perdana menteri Inggris yang paling anti-Eropa. Ketidaksukaan Thatcher pada ide integrasi Eropa dengan tegas diungkapkannya seperti yang jelas terungkap dalam pidatonya di Bruges-Belgia pada September 1988. Berbeda dengan Thatcher, Perdana Menteri Tony Blair (1997-2007) adalah perdana menteri yang dinilai paling “bersahabat” dengan Eropa meskipun tidak mampu membawa Inggris untuk lebih kongkrit lagi berdiri sejajar dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Pendahuluan

Sejarah dan geo-politik Inggris sangat khas dan istimewa. Demokrasi yang kita kenal sekarang sudah mulai dikenal Inggris sejak tahun 1215 Masehi ketika Piagam Magna Charta ditandatangani. Inggris juga tempat di mana Revolusi Industri pertama kali muncul pada tahun 1750-an. Imperialismenya ke Afrika, Asia, Australia, dan Amerika menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan dunia. Sekarang ini Inggris masih merupakan negara terkuat dalam ekonomi dan militer dan juga merupakan salah satu negara pemegang hak veto di PBB. Letak geografis Inggris yang berbentuk kepulauan

membuatnya terpisah dengan negara-negara Eropa lain yang berada dalam satu kontinen. Kondisi ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Inggris dari sisi pertahanan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I dan dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1588 yaitu pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I Inggris berhasil mengalahkan armada besar Spanyol yang antara lain diuntungkan oleh faktor alam Inggris. Faktor geografis juga memberi keuntungan pada Inggris di Perang Dunia II yang menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara di Eropa Barat yang selamat dari invasi tentara NAZI Jerman meskipun tidak luput dari serangan udara.

Inggris setelah Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ekonomi Inggris pun mengalami kehancuran. Bila sebelum Perang Dunia II Inggris merupakan negara kreditor terbesar maka setelah perang Inggris menjadi negara pengutang terbesar di dunia.¹ Perlahan-lahan Inggris kehilangan pengaruhnya di dunia. Tahun 1947, India terpaksa diberikan kemerdekaannya. Kemerdekaan India ini kemudian disusul dengan dekolonisasi negara-negara jajahan Inggris lainnya. Menghadapi situasi yang berubah ini Inggris terdorong untuk tetap mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat sebagaimana yang terlihat pada Perang Dunia II. Sampai tahun 1950-an sebagian besar orang Inggris masih percaya bahwa masa depan Inggris adalah bersama Amerika Serikat yang mempunyai kesamaan ras dan bahasa. Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat ini kemudian berubah menjadi ketergantungan Inggris ke Amerika Serikat.

Pada tahun 1960an pandangan Inggris yang memprioritaskan hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat daripada dengan Eropa mulai berubah. Saat itu Inggris mulai menyadari pentingnya untuk juga menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangganya di Eropa sebagaimana yang telah disadari lebih dulu oleh 6 negara Eropa yaitu Belanda, Belgia, Luxemburg, Italia, Jerman, dan Perancis ketika pada tahun 1951 mendeklarasikan *European Coal and Steel Community*. Dengan didirikannya

ECSC, Industri Inggris sangat dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan Jerman, Perancis, dan Italia yang dapat dengan bebas bergerak di antara mereka sendiri dan di negara-negara Benelux.² Hal tersebut bersamaan dengan makin berkurangnya pengaruh Inggris terhadap negara-negara Persemakmuran tempat barang-barang Inggris dijual. Sementara itu Amerika Serikat juga mulai melihat Eropa termasuk Inggris sebagai satu kesatuan dan lebih memusatkan perhatiannya pada Cina. Aliansi Atlantik bagi Amerika Serikat adalah aliansi antara Amerika Serikat dengan Eropa Barat daripada persekutuan dengan Inggris saja.³

Motif ekonomi dan politik menjadi faktor pendorong keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa (*European Community*) yang pada 1992 berubah menjadi Uni Eropa.⁴ Tidak Mudah bagi Inggris untuk meyakinkan enam anggota Masyarakat Eropa terutama Perancis untuk diterima sebagai anggota. Setelah bertahun-tahun berusaha, baru pada 1971 Inggris diterima sebagai anggota Masyarakat Eropa bersama-sama dengan Denmark, Irlandia dan Norwegia. Setelah resmi menjadi anggota Masyarakat Eropa, terdapat banyak penyesuaian yang harus dilakukan Inggris terutama disektor perekonomian dan keuangan

² C. P. F. Luhulima. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta:Gramedia, 1992, h. 65.

³ *Ibid.*, h. 87.

⁴ Cikal bakal Uni Eropa adalah European Steel and Coal Community (ECSC) yang didirikan pada April 1951. Perjanjian Roma tahun 1957 mengukuhkan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) yang resmi berdiri pada Januari 1958. Pada Juli 1967 ECSC, MEE dan Euratom digabung menjadi Masyarakat Eropa (European Community).

¹ Howard J. Wiarda (editor). *European Politics in The Age Globalization*, Forth Worth:Harcourt College Publisher, 2001, h. 58.

yang tidak mudah dilakukan. Kebijakan perdana menteri juga tidak selamanya mendukung integrasi Inggris yang lebih dalam dalam Masyarakat Eropa akibatnya seringkali Inggris “mbalelo” dari kebijakan MEE. Makalah ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana Inggris dalam Masyarakat Eropa (kemudian Uni Eropa) sejak diterima secara resmi sebagai anggota pada 1973 sampai sekarang. Mengapa dalam penerimaannya sebagai anggota, Inggris seringkali tidak sejalan dengan anggota Masyarakat Eropa lainnya.

Proses Masuknya Inggris dalam Keanggotaan Masyarakat Eropa

Tidak lama setelah PM Harold Macmillan (Partai Konservatif) pada 31 Juli 1961 menyatakan akan mengajukan keanggotaan Inggris di Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) maka dimulailah perundingan-perundingan resmi di antara Inggris dan MEE untuk menyepakati keanggotaan Inggris tersebut. Namun perundingan-perundingan tersebut terdapat ganjalan terutama ketika membahas mengenai sektor pertanian yang sangat sensitif di banyak negara anggota MEE. Inggris mengimpor semua hasil pertaniannya sehingga tidak perlu memproteksi hasil pertaniannya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan negara anggota MEE lainnya yang sangat berkepentingan dalam melindungi hasil pertaniannya. Petani di Eropa kontinen sudah sejak lama mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan masing-masing negaranya dan diisolasi dari pasaran dunia karena penghasilan petani Eropa relatif rendah sedangkan ongkos produksi tinggi sekali.⁵

⁵ *Ibid.*, h. 73.

Berlarut-larutnya proses perundingan antara Inggris dan MEE, makin menguatkan keyakinan Presiden Perancis Charles de Gaulle bahwa Inggris dan negara-negara MEE sangat berbeda. De Gaulle khawatir ciri khas yang dibawa Inggris dan negara-negara lain yang akan masuk mengikutinya akan mengubah kesepakatan yang telah dibuat Perancis dan enam anggota awal MEE. Kekhawatiran ini mencapai puncaknya ketika Inggris menandatangani persetujuan pertahanan dengan Amerika Serikat pada 21 Desember 1962. Dengan persetujuan tersebut Inggris menyerahkan hak pertahanan nuklirnya pada Amerika Serikat sehingga apabila Inggris menjadi anggota MEE otomatis Amerika Serikat akan mempunyai pengaruh langsung atas MEE. Perkembangan ini tentu menjadi ancaman bagi Perancis yang menginginkan Eropa lepas dari pengaruh Amerika Serikat maka pada 14 Januari 1963, Presiden Gaulle memutuskan untuk memveto keanggotaan Inggris di MEE.⁶ Pada saat itu sebenarnya keanggotaan Inggris tinggal menunggu waktu saja tapi veto Perancis menghalangi masuknya Inggris ke MEE.

Gagal dengan keanggotaan pertama, Inggris yang berada dalam pemerintahan PM Harold Wilson (Partai Buruh) kembali lagi mengajukan permohonan keanggotaan MEE pada April 1966. Ketika itu permasalahan-permasalahan yang mengganjal pada tahun 1961-1963 seperti masalah pertanian dan Persemakmuran relatif sudah teratasi. Inggris berjanji bahwa keanggotaannya tidak akan mengubah dasar-dasar Masyarakat Eropa bahkan

⁶ *Ibid.*, hh. 78-80.

masuknya Inggris merupakan sinergi bagi Eropa Barat. Usaha Inggris ini kembali mendapat ganjalan dari Presiden de Gaulle yang kembali mengajukan veto pada Mei 1967. Presiden de Gaulle masih menganggap Inggris belum siap masuk ke dalam keanggotaan MEE karena hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat. Selain itu muncul pula keraguan di antara 5 anggota MEE yang khawatir akan ikut terbebani dengan perekonomian Inggris. Maka usaha Inggris untuk menjadi anggota MEE pun mengalami kegagalan kembali. Adalah jelas bahwa selama de Gaulle masih menjadi presiden Perancis maka keanggotaan Inggris dalam MEE adalah suatu hal yang mustahil.

Pada tahun 1969, de Gaulle mengundurkan diri sebagai presiden Perancis digantikan oleh George Pompidou. Di bawah pemerintahan baru ini Perancis menyatakan tidak akan menghalangi niat Inggris ataupun negara-negara Eropa lainnya masuk dalam Masyarakat Eropa apabila perluasan keanggotaan tersebut tidak merugikan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Setelah terjadi serangkaian pembicaraan yang intensif antara Masyarakat Eropa dan Inggris dan calon anggota lainnya (Norwegia, Denmark, dan Republik Irlandia) sejak 30 Juni 1970 maka pada tanggal 23 Juni 1971 Dewan Menteri Masyarakat Eropa menyatakan bahwa perundingan-perundingan tersebut telah menghasilkan dasar-dasar yang kuat untuk keanggotaan Inggris dan calon anggota lainnya. Secara resmi Inggris menjadi anggota Masyarakat Eropa pada 1 Januari 1973.

Inggris Dalam Masyarakat Eropa Setelah diterima dalam

Masyarakat Eropa, Inggris harus menyesuaikan banyak hal dengan aturan-aturan Masyarakat Eropa yang ternyata tidak mudah. Ketika Inggris diterima menjadi anggota Masyarakat Eropa, yang menjabat sebagai perdana menteri adalah Edward Heath dari Partai Konservatif. Masuknya Inggris ke dalam Masyarakat Eropa pada masa pemerintahan Heath dianggap sebagai suatu prestasi di tengah-tengah berbagai problem ekonomi dan keamanan berkenaan dengan peristiwa "*Bloody Sunday*" di Irlandia Utara. Namun, dukungan terhadap masuknya Inggris di Masyarakat Eropa mendapat tentangan pada masa pemerintahan perdana menteri Inggris selanjutnya Harold Wilson dari Partai Buruh.⁷

Harold Wilson adalah perdana menteri yang melamar keanggotaan MEE untuk kedua kalinya pada 1966. Ironisnya pada masa pemerintahannya yang kedua, Harold Wilson mendapat tekanan kuat untuk membawa Inggris keluar dari keanggotaan MEE yang ketika itu telah lebur dengan Euratom dan ECSC menjadi Masyarakat Eropa. Begitu kuatnya tekanan sampai pendapat Partai Buruh sendiri pun terbelah. Wilson memecahkan permasalahan dengan cara yang belum pernah terjadi di Inggris yaitu menyelenggarakan referendum untuk memutuskan kelangsungan keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa. Referendum yang dilaksanakan pada 5 Juni 1975 ternyata tetap menginginkan keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa.⁸

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Heath diakses pada 20 April 2009

⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/James_Callaghan diakses pada 20 April 2009

Periode 1978 -pada masa pemerintahan Perdana Menteri James Callaghan (Partai Buruh)- merupakan periode sulit bagi Inggris karena situasi ekonomi yang buruk. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang buruk pemerintah Callaghan lebih memilih untuk meminjam dari IMF ketimbang bergabung dalam *European Monetary System* (EMS). Selama negosiasi EMS, Callaghan memilih Kenneth Couzens – yang dikenal skeptis terhadap koordinasi mata uang Eropa- sebagai wakil pemerintah Inggris. Dalam negosiasi pemerintah Inggris menghubungkan penerimaan pengaturan EMS dengan tuntutan reformasi *Common Agricultural Policy* (CAP). CAP yang diperkenalkan sejak Januari 1962 pada pokoknya adalah subsidi pada pertanian yang sangat tidak efisien di Eropa. CAP adalah sistem yang menjamin harga-harga bagi petani untuk menjamin produksi dan stabilitas pangan. Proteksi pertanian di Eropa sudah dimulai sejak abad ke-19 ketika ledakan penduduk menyebabkan berkurangnya penghasilan petani sehingga pemerintah harus mensubsidi mereka. Setelah Perang Dunia II, pemerintah di negara-negara Eropa terus mensubsidi kebijakan pangan mereka karena pertumbuhan sektor pertanian jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor industri. Pemerintah di negara-negara Eropa juga tidak dapat begitu saja mengabaikan kepentingan para petani yang mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat di masing-masing negara. Pemerintah di negara-negara Eropa masih menganggap swasembada pangan sangat penting sebagai bagian dari pertahanan nasional.⁹

⁹ C.P.F. Luhulima. *Op., Cit.* pp 72-76

Terhadap EMS, Callaghan dan menteri keuangannya Denis Healey berkeras untuk tetap mengikutsertakan Amerika Serikat dalam setiap solusi yang menyangkut ketidakstabilan mata uang. Inggris khawatir resiko menghubungkan mata uangnya dengan mata uang negara-negara MEE lain akan mengakibatkan deflasi dan berpengaruh buruk pada perekonomiannya. Pemerintah Inggris ketika itu juga beranggapan bahwa posisi Inggris sebagai *net oil exporter* dengan minyak Laut Utara berbeda dengan negara-negara Masyarakat Eropa lainnya sehingga pengaturan EMS juga akan membawa dampak yang berbeda. Pada akhirnya Pemerintahan Callaghan memilih ikut dalam EMS tapi tidak ikut dalam *Exchange Rate Mechanism* (ERM) yang justru merupakan inti dari EMS.¹⁰

Kekuasaan Partai Buruh berakhir pada 1979 setelah mendapat mosi tidak

¹⁰ Pada Hague Summit pada 1969 telah disetujui untuk merintis tahapan Economic and Monetary Union (EMU). Werner Plan (1970) disetujui sebagai acuan proses EMU yang terdiri dari 3 tahapan hingga 1980. Akan tetapi tahapan EMU tidak berjalan mulus karena perbedaan-perbedaan yang prinsipil di antara negara-negara anggota Masyarakat Eropa tentang bagaimana EMU diwujudkan dan situasi ekonomi internasional pada saat itu yang mengguncang system Bretton Wood yang telah mapan sejak PD II di negara-negara Barat. Berakhirnya system Bretton Wood pada 1971, membuat negara-negara Eropa Barat membuat mekanisme nilai tukar sendiri yang disebut “snake”. Tidak semua negara Masyarakat Eropa menjadi anggota sistem “snake”. ERM diperkenalkan pada 1979 sebagai bagian dari *European Monetary System* (EMS). Selain ERM, untuk memuluskan pengaturan ekonomi dan moneter Masyarakat Eropa, pada 1980an EMU kembali dijalankan lagi yang juga terdiri dari tiga tahap sampai tahun 1999. Lihat Ami Verdun. *Economic and Monetary Union* dalam *European Union Politics*, Oxford:Oxford University Press, 2003 pp 312-329

percaya. Pemerintahan pun beralih ke tangan Partai Konservatif di bawah Perdana Menteri Margareth Thatcher (1979-1991) yang dikenal mempunyai sedikit saja mempunyai perhatian terhadap politik luar negeri termasuk pada Masyarakat Eropa. Bagi Thatcher kepentingan Inggris merupakan hal yang paling utama yang selalu dinyatakan langsung tanpa tedeng aling-aling. Politik luar negeri Thatcher ditekankan pada tiga hal: *pertama*, memastikan Inggris tetap dihormati sebagai negara yang berkuasa dengan memiliki senjata nuklir dan kedudukan permanen dalam dewan keamanan PBB; *kedua*, aliansi yang erat dengan Amerika Serikat; dan *ketiga*, tidak mempunyai keinginan bagi persatuan Eropa yang lebih dalam.¹¹

Terhadap MEE, Thatcher sangat mencurigai arah perkembangan institusi itu menjadi kumpulan birokrasi besar yang dibencinya.¹² Pada sebuah pidato dalam rangka pemilihan langsung pertama parlemen Eropa, Thatcher mengatakan:

*"....we believe in a free Europe, not a standardized Europe...we insist that the institutions of the European of European Community are managed so that they increase the liberty of the individual throughout the continent. These institutions must not be permitted to dwindle into bureaucracy. Whenever they fail to enlarge freedom the institutions should be criticized and the balance restored"*¹³

¹¹ Eric J. Evans. *Thatcher and Thatcherism*, Routledge: Kent, 1997 p.81

¹² Thatcher terkenal sebagai pengikut aliran neo liberalisme yang menginginkan campur tangan minimal pemerintah. Selama pemerintahannya Thatcher mengurangi jumlah pegawai negeri hingga 22,5%.

Dari pidato tersebut dapat dipahami bahwa Thatcher menginginkan Masyarakat Eropa tidak membuat kebebasan menjadi berkurang bagi negara-negara di Eropa karena membesarnya birokrasi.

Pada masa pemerintahannya, Thatcher memfokuskan diri pada pemulihan ekonomi Inggris yang terus menurun pada masa pemerintahan sebelumnya. Untuk itu ia berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan pajak. Thatcher yang dikenal tidak terlalu *concern* pada Masyarakat Eropa berusaha keras untuk meminta pemotongan sumbangan Inggris untuk institusi tersebut. Dalam pertemuan dengan pemimpin Masyarakat Eropa di Strasbourg pada Juni 1979 mengatakan tidak akan menjadi "anak yang dermawan" disaat konstituennya meminta perbaikan dalam berbagai bidang". Ketelitian Thatcher dalam hal keuangan membuat Presiden Perancis Valery Giscard d'Estaing menyebut Thatcher seperti "*la fille d'Epicier*" atau "saudara perempuan pengecer". Meskipun Thatcher menjadi tidak populer dikalangan pemimpin Masyarakat Eropa, ia akhirnya mendapatkan persetujuan rabat selama tiga tahun yang mencapai total 1,570 juta poundsterling.¹⁴

Masalah lain yang dihadapi Thatcher dalam Masyarakat Eropa berkenaan dengan CAP (*Common Agricultural Policy*). Seperti yang dilakukan pendahulunya, Thatcher menuding kebijakan CAP tidak bermanfaat dan berlebihan. Thatcher menyebut program CAP menghabiskan hampir 70 persen budget Masyarakat

¹³ Eric J. Evans. Loc. Cit.

¹⁴ *Ibid.*, p.82

Eropa pada saat ia meraih tampuk pemerintahan. Bagi Thatcher subsidi CAP lebih menguntungkan petani yang tidak efisien di daratan Eropa (baca: Perancis) daripada petani Inggris yang lebih efisien. Inggris sendiri pada dasarnya adalah negara industri yang bertumpu sedikit saja pada pertanian.

Pada tahun 1988, Presiden Komisi Masyarakat Eropa Jacques Delors mengetuai sebuah komisi yang akan mengembangkan strategi bagi uni-ekonomi dan moneter Eropa yang dikenal sebagai *Delors Plan*. *Delors Plan* ingin menerapkan mata uang tunggal di seluruh Eropa. Jaques Delors-intelektual, sosialis dari Perancis-dikenal suka mengintervensi pada masalah internal negara-negara anggota MEE. Dalam sebuah kunjungan ke Inggris pada tahun 1988, ia mengetengahkan pandangannya tentang federasi dan sosialis Eropa. Sebagai seorang anti-Eropa, Thatcher menyebut sikap Delors akan mencederai demokrasi karena akan membawa Eropa menuju sentralisasi dan birokratisasi. Dalam pidato yang terkenal sebagai "*Bruges Speech*" pada 20 September 1988, ia menyatakan Eropa berjalan ke arah yang salah sembari menekankan pentingnya pentingnya keberagaman di Eropa. Memang kemudian Thatcher menyetujui juga masuknya Inggris dalam pengaturan *European Exchange Mechanism* (ERM), tetapi hal tersebut dilakukan karena tekanan Masyarakat Eropa dan orang dalam partainya sendiri.¹⁵

Masa pemerintahan Perdana Menteri John Major dari Partai Konservatif ditandai oleh perubahan besar yaitu berakhirnya Perang Dingin yang telah berlangsung hampir lima

puluh tahun. Dengan berakhirnya Perang Dingin, tampak keinginan negara-negara Uni Eropa terutama Perancis dan Jerman untuk lebih mandiri dan mempunyai identitasnya sendiri di dunia tanpa bayang-bayang Amerika Serikat.¹⁶ Pada saat dilantik sebagai perdana menteri, John Major berjanji tidak akan meneruskan kebijakan Eropa Thatcher. Akan tetapi situasi ekonomi yang sulit kembali harus dihadapi Inggris pada masa pemerintahan Major. Pemberlakuan tingkat suku bunga yang tinggi oleh Jerman menyebabkan Inggris sulit menurunkan suku bunganya sehingga Inggris terjebak dalam resesi yang lebih dalam lagi.¹⁷

Major setuju pada Economic Monetary Union (EMU) tapi hanya jika Uni Eropa mengamandemen Maastricht Treaty yang memungkinkan Inggris opt-out pada EMU jika menginginkannya.

Sejak 1997 hingga kini Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh. Perdana Menteri Tony Blair yang berkuasa selama sepuluh tahun hingga 2007 terkenal dengan kebijakannya yang sangat loyal terhadap Amerika Serikat. Berbeda dengan Perancis dan Jerman yang menentang Perang Irak, Inggris di bawah pemerintahan Tony Blair sangat mendukung kebijakan Presiden Amerika Serikat George Bush Jr untuk menginvasi Irak pada 2003 setelah sebelumnya juga mendukung kebijakan AS menginvasi Afghanistan pada 2001.

Berbeda dengan perdana menteri Inggris lainnya, Tony Blair dikenal

¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/John_Major diakses pada 20 April 2009

¹⁷ Davies, Norman, *The Isles: A History*, 2nd Edition London: Macmillan, 2000, hh. 867-868

¹⁵ *Ibid*, pp.85-86

sebagai pemimpin pemerintahan Inggris yang *felt at home at EU*.¹⁸ Namun begitu sikap bersahabat yang ditunjukkan Perdana Menteri Blair belum berhasil membawa Inggris semakin dekat dengan Eropa. Blair adalah perdana menteri termuda dalam sejarah Inggris setelah William Pitt pada abad ke-18. Ia adalah generasi yang lahir setelah tahun 1950 yang tidak mengalami langsung Perang Dunia sebagaimana perdana menteri-perdana menteri Inggris sebelumnya. Dengan latar belakang tersebut dapat dimengerti sikap yang lebih moderat yang ditunjukkannya terhadap Eropa meskipun masih belum mampu membawa Inggris ke langkah yang lebih kongkrit seperti masuk dalam zona Euro.

Gordon Brown menggantikan Tony Blair sejak 2007. Sebagai menteri keuangan Tony Blair yang sama-sama berasal dari Partai Buruh, sejak awal diperkirakan tidak ada yang berubah dalam kebijakan Inggris menyangkut Eropa. Pandangan politik luar negerinya tetap *Atlanticist* meskipun tidak terlalu menyolok seperti masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan Brown tentang Eropa dan Uni Eropa pun tidak akan berubah banyak. Ia memandang Uni Eropa fleksibel, menganut pasar bebas dan pragmatis. Ketika menjadi menteri keuangan masa Perdana Menteri Blair, Gordon Brown telah mempertahankan Inggris tidak mengadopsi Euro yang dilanjutkan pada saat ia menjabat sebagai perdana menteri.¹⁹

¹⁸ Michael Spirtas. *Lukewarm Pint: British Policy Toward European Monetary Cooperation 1978-1992* http://aei.pitt.edu/2734/01/002730_1.PDF diakses pada 15 April 2009

¹⁹ James Robbins. *Assesing Blair's Foreign Policy*, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6601097.stm diakses pada 11 Mei 2009

Penutup

Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai berbagai kesamaan seperti bahasa, kultur, dan sejarah membuat Inggris lebih mementingkan hubungan luar negerinya pada negara di seberang Atlantik itu daripada ke negara-negara di Eropa. Namun keadaan berubah pada tahun 50-60-an ketika peran Inggris di dunia semakin tidak dominan seiring dengan berubahnya kebijakan Amerika Serikat dalam memandang Inggris, terus merosotnya perekonomian Inggris, dan makin menurunnya hubungan dengan negara-negara persemakmuran yang justru menjadi pasar bagi produk-produk Inggris.

Inggris pun mengalihkan perhatian ke Eropa dan berniat menjadi anggota MEE. Namun keanggotaan Inggris ke dalam MEE tidak mudah karena mendapat tantangan terutama dari Perancis di bawah Presiden de Gaulle. Inggris baru dapat menjadi anggota MEE (yang telah lebur ke dalam European Community) pada masa Perancis berada di bawah kepemimpinan Presiden Pompidou. Keanggotaan Inggris dalam *EC* (sekarang bernama *European Union*) sampai sekarang masih menarik untuk dikaji karena seperti yang ditakutkan de Gaulle dahulu, Inggris memang mempunyai kepentingan yang berbeda dengan negara *EU* terutama dengan Perancis. Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hingga sekarang meskipun minoritas masih dapat ditemukan *Euroscepticism* di Inggris.²⁰ Tampaknya Inggris masih memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dalam keluarga besarnya, Eropa.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Davies, Norman, *The Isles: A History*,
2nd Edition London: Macmillan,
2000

Eric J. Evans. *Thatcher and
Thatcherism*, Routledge:Kent,
1997

Luhulima, C. P. F. *Eropa Sebagai
Kekuatan Dunia: Lintasan
Sejarah dan Tantangan Masa
Depan*, Jakarta:Gramedia, 1992

Michelle Cini. (ed). *European Union
Politics*, Oxford:Oxford
University Press, 2003

Wiarda, Howard J. (ed). *European
Politics in The Age Globalization*,
Forth Worth:Harcourt College
Publisher, 2001

Internet

Michael Spirtas. *A Lukewarm
Pint:British Policy Toward
European Monetary
Cooperation 1978-1992* [http://
www.....](http://www.....)

Reynold, Paul. *Will Brown Change UK
Foreign Policy?* [http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/6234592.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6234592.stm) diakses
pada 12 Mei 2009

Robbins, James. *.Asserting Blair's
Foreign Policy*, [http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/6601097.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6601097.stm) diakses
pada 11 Mei 2009

[http://
en.wikipedia.org/wiki/
Edward_Heath](http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Heath) diakses pada 20
April 2009

[http://
en.wikipedia.org/wiki/
James_Callaghan](http://en.wikipedia.org/wiki/James_Callaghan) diakses pada
20 April 2009

[http://
en.wikipedia.org/wiki/
John_Major](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Major) diakses pada 20
April 2009

²⁰ Paul Reynold. *Will Brown Change UK Foreign
Policy?* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/6234592.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6234592.stm) diakses pada 12 Mei
2009